

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan Daerah
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PERUBAHAN 2025 RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

2025



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
Telepon (0751) 4784555, Fax. (0751) 4784554 E-mail : dppkd@padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR : 50/BPKD/KEP-2025

T E N T A N G RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah tentang Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029;
 29. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten, dipimpin oleh Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah;
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;

12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
13. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
15. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (output) suatu program;
17. Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*);
19. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud;
20. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program;
21. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/ layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II

RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pasal 2

1. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (tahun) tahun terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2025.

2. Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan.
3. Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.
4. Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman disesuaikan dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk periode 1 (satu) tahun dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

1. Dalam melakukan Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, masing-masing Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan;
2. Sebagai bahan operasional tahunan, selanjutnya disusun Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025.

BAB IV

DATA DAN INFORMASI

Pasal 4

Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal, 28 Juli 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Padang Pariaman government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN" at the top and "BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH" at the bottom. In the center of the stamp is the official emblem of Kabupaten Padang Pariaman. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

TASLIM LETER, SE. Ak

Pembina Tk. I, NIP. 19740715 200212 1 011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Badan Pengelola Keuangan Daerah Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II	16
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 ...	16
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	55
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	66
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja	67
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	87
BAB III	88
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	88
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	88
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	93
3.3 Program dan Kegiatan	100
BAB IV	126
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	126
BAB V	176
PENUTUP	176

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (T-C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah s/d Tahun 2024.....	30
Tabel 2.2 (T-C 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.....	57
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.....	58
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Sasaran 1.....	59
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Sasaran 2.....	60
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Sasaran 3.....	61
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Sasaran 3.....	62
Tabel 2.8 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.....	63
Tabel 2.9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 (T-C 31).....	67
Tabel 3.1 Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.....	88
Tabel 3.2 Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	90
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja BPKD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.....	94
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	96
Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	96
Tabel 3.6 Program, Sasaran Program, Indikator Program dan Target Tahun 2025.....	98
Tabel 3.7 (TC 33) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.....	104
Tabel 4.1 Matriks Renja Format SIPD.....	124

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan.....	5
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan

Renja PD sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi

masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Renja PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun.

Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

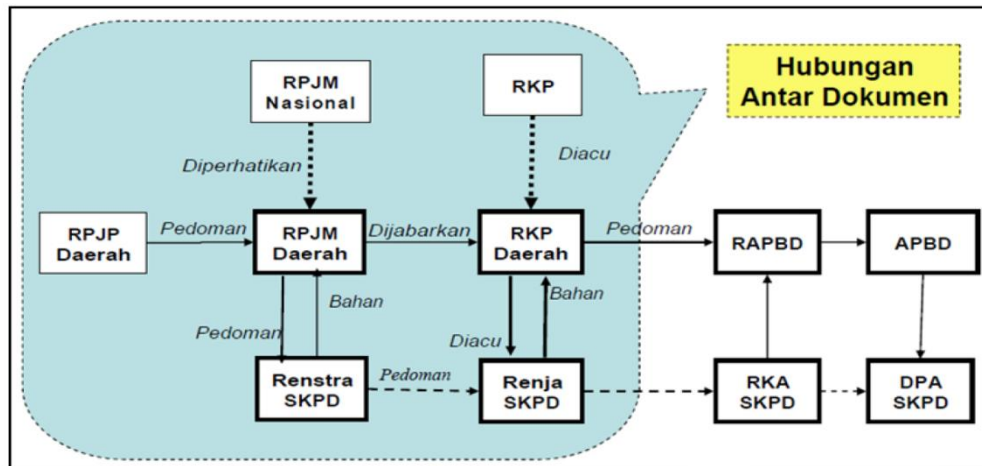
Tidak hanya itu, Renja PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir

periode lima tahun. Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki

prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja Perubahan, Badan Pengelola Keuangan Daerah juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD Perubahan. Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2025-2029 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang

kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029;
29. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

30. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 ini dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan dan penganggaran di tahun 2025. Adapun tujuannya adalah mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja BPKD adalah :

1. Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan BPKD.
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan BPKD sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan BPKD dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja BPKD disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra

Secara umum untuk program dan kegiatan dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Secara umum untuk program dan kegiatan dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Kegiatan	Pencapaian kinerja				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		target	Realisasi	%	Satuan			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	AA	A	100 %	Nilai	11,150,156,493	10,483,940,406	94.03
		100%	100%	100 %	Persentase			
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100 %	Persentase	101,512,250	70,603,105	69.55
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100 %	Dokumen	24,485,640	23,387,105	95.51
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100 %	Dokumen	15,220,000	12,143,300	79.79
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	30	100 %	Laporan	61,806,610	35,072,700	56.75
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100 %	Persentase	7,899,563,813	7,429,341,088	94.05
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41	41	100 %	orang/bulan	7,705,283,813	7,235,421,088	93.9
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100 %	Dokumen	194,280,000	193,920,000	99.81
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100 %	Persentase	5,650,000	4,570,805	80.9
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80	-	%	Paket	-	-	-
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41	41	100 %	Orang	5,650,000	4,570,805	80.9
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100 %	Persentase	618,542,000	592,971,498	95.87
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	100 %	Paket	9,082,000	9,072,030	99.89
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	100 %	Paket	32,331,400	32,324,950	99.98
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100 %	Laporan	14,760,000	14,702,000	99.61
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100 %	Laporan	562,368,600	536,872,518	95.47
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100 %	Persentase	5,500,000	5,494,500	99.9

1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20	20	100 %	Unit	5,500,000	5,494,500	99.9
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100 %	Persentase	2,389,818,430	2,270,679,341	95.01
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100 %	Laporan	936,523,310	900,750,134	96.18
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100 %	Laporan	180,960,000	161,411,647	89.2
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100 %	Laporan	1,272,335,120	1,208,517,560	94.98
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100 %	Persentase	129,570,000	110,280,069	85.11
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	10	100 %	Unit	46,890,000	42,068,504	89.72
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100 %	Unit	39,570,000	26,079,515	65.91
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20	20	100 %	Unit	43,110,000	42,132,050	97.73
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	30-Nov-23	30-Nov-23	100 %	Tanggal	189,939,794,348	185,039,566,895	97.42
		100%	100%	100 %	Persentase			
		100%	100%	100 %	Persentase			
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	30-Nov-23	30-Nov-23	100 %	Tanggal	1,495,109,500	1,191,804,112	79.71
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	4	4	100 %	Dokumen	26,570,000	26,282,510	98.92
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	4	100 %	Dokumen	7,340,000	7,241,200	98.65
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	44	44	100 %	Dokumen	56,710,000	30,173,600	53.21
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	44	44	100 %	Dokumen	33,090,000	26,265,500	79.38
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	44	44	100 %	Dokumen	2,420,000	2,320,000	95.87

6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	44	44	100 %	Dokumen	21,807,500	2,850,000	13.07
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4	4	100 %	Dokumen	1,251,547,000	1,058,605,762	84.58
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4	4	100 %	Dokumen	10,915,000	10,307,500	94.43
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	2	100 %	Dokumen	84,710,000	27,758,040	32.77
B	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	100 %	Persentase	394,370,000	245,363,018	62.22
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	1	100 %	Dokumen	115,430,000	78,790,718	68.26
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1	1	100 %	Dokumen	14,560,000	9,546,293	65.57
3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	1	100 %	Dokumen	3,550,000	3,434,000	96.73
4	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1	1	100 %	Dokumen	60,090,000	35,289,200	58.73
5	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1	1	100 %	Dokumen	30,000,000	15,027,355	50.09
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1	1	100 %	Laporan	28,520,000	25,595,000	89.74
7	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan	1	1	100 %	Dokumen	-	-	-

	penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas							
8	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	1	1	100 %	Dokumen	52,520,000	8,865,000	16.8 8
9	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	1	100 %	Dokumen	11,310,000	1,340,000	11.8 5
10	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	205	205	100 %	Orang	78,390,000	67,475,452	86.0 8
C	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%	100 %	Persentase	403,030,000	300,941,950	74.6 7
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	12	100 %	Laporan	19,910,000	17,212,150	86.4 5
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	46	46	100 %	Laporan	66,685,000	56,785,950	85.1 6
3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4	4	100 %	Dokumen	52,595,000	44,825,800	85.2 3
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5	5	100 %	Dokumen	5,040,000	1,331,000	26.4 1
5	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2	2	100 %	Dokumen	21,635,000	20,759,550	95.9 5
6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	547	547	100 %	Orang	237,165,000	160,027,500	67.4 8

	Pemerintah Kabupaten/Kota							
D	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100 %	Persentase	187,630,140,848	183,286,555,385	97.69
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	1	100 %	Laporan	176,617,325,166	175,943,177,551	99.62
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	100 %	Laporan	3,000,000,000	1,729,558,250	57.65
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	1	100 %	Laporan	8,012,815,682	5,613,819,584	70.06
E	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	100%	100 %	Persentase	17,144,000	14,902,430	86.93
1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	44	44	100 %	Dokumen	17,144,000	14,902,430	86.93
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100%	100%	100 %	Persentase	885,944,800	783,075,858	88.39
		100%	100%	100 %	Persentase			
		100%	100%	100 %	Persentase			
F	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100 %	Persentase	885,944,800	783,075,858	88.39
		100%	100%	100 %	Persentase			
		100%	100%	100 %	Persentase			
1	Penyusunan Standar Harga	2	2	100 %	Dokumen	11,781,800	11,564,150	98.15
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	2	100 %	Dokumen	3,773,400	3,669,200	97.24
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	22	22	100 %	Laporan	335,504,600	292,036,294	87.04
4	Penilaian Barang Milik Daerah	4	4	100 %	Laporan	191,254,300	184,817,350	96.63
5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7	7	100 %	Dokumen	73,379,000	65,510,808	89.28
6	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	556	556	100 %	Laporan	56,938,500	26,887,750	47.22

7	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1200	1200	100 %	Orang	213,313,200	198,590,306	93.1
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	95%	95%	95%	Persentase	3,601,802,000	3,396,533,687	94.3
		100%	100%	100 %	Persentase			
G	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	95%	95%	95%	Persentase	3,601,802,000	3,396,533,687	94.3
		100%	100%	100 %	Persentase			
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1	1	100 %	Dokumen	278,507,000	271,467,709	97.47
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	33	33	100 %	Laporan	241,375,000	231,244,350	95.8
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3	3	100 %	Unit	25,520,000	5,875,000	23.02
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1	1	100 %	Laporan	231,700,000	123,355,000	53.24
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8	8	100 %	Obyek Pajak	2,160,490,000	2,156,060,835	99.79
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	3	3	100 %	Dokumen	60,720,000	52,794,400	86.95
7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1	1	100 %	Dokumen	31,540,000	21,213,000	67.26
8	Penagihan Pajak Daerah	7	7	100 %	Dokumen	516,340,000	479,252,143	92.82
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	7	7	100 %	Dokumen	55,610,000	55,271,250	99.39
JUMLAH						205,577,697,641	199,703,116,846	97.14

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Secara umum untuk program dan kegiatan tidak melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

1. Kerjasama yang baik dengan Bank Nagari.
2. Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait (DPMD dan Nagari).
3. Kerjasama dengan perangkat daerah terkait pengampu DAK dan APIP.
4. Kualitas dan kuantitas SDM pengelola keuangan yang cukup baik.
5. Percepatan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah dengan melakukan rekon secara intens.
6. Pembinaan terhadap pengelolaan dana BOS melalui rekonsiliasi belanja dana BOS.
7. Mengupayakan tidak terjadinya temuan berulang dengan cara mendaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK RI.
8. Melakukan peningkatan konsolidasi internal dan eksternal.
9. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*money follow result*) dengan melakukan verifikasi RKA.
10. Melakukan konsultasi dan koordinasi serta perubahan kebijakan terkait UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah.
11. Melaksanakan rekonsiliasi keuangan pertriwulan.
12. Percepatan proses persyaratan pencairan sesuai PMK.
13. Membuat surat edaran tentang Batasan pencairan dan percepatan penyelesaian pencairan.
14. Meminta persetujuan pimpinan terhadap perpanjangan waktu pencairan.
15. Melakukan inventarisasi BMD.
16. Melaksanakan rekonsiliasi BMD pertriwulan.
17. Melakukan kerjasama dengan perangkat daerah dalam pembayaran pajak kendaraan dinas.
18. Melakukan peningkatan konsolidasi internal dan eksternal.
19. Melakukan pembinaan terhadap pengurus barang pengguna dan pejabat penatausahaan barang pengguna.
20. Maksimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga atas barang / asset daerah yang yang bisa dipinjam pakai.
21. Pembayaran pajak kendaraan dinas tepat waktu.

22. Penetapan RKBMD tahun 2023 tepat waktu.
23. Melakukan pemetaan RKBMD, RPBMD dan standar harga.
24. Optimalisasi penghapusan BMD sesuai target yang telah ditetapkan.
25. Ketersediaan dana dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan serta pemenuhan dokumen tepat waktu
26. Komitmen dalam pertanggungjawaban PPTK terhadap SPJ kegiatan
27. Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran
28. Adanya dukungan kualitas sumber daya aparatur
29. Adanya sinergitas dengan seluruh pihak/stackholder terkait
30. Terjalannya koordinasi internal dengan baik
31. Penyetoran pajak tepat waktu.
32. Penerimaan pajak daerah sampai tahun anggaran tercapai sebesar 91,36% dan penerimaan retribusi daerah tercapai sebesar 92,95%.
33. Penilaian individu terhadap beberapa objek pajak.
34. Pemutakhiran massal pada 3 (tiga) kecamatan, diantaranya Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Enam Lingkung, dan Kecamatan 2X11 Kayu Tanam.
35. Pengoptimalan penerimaan pajak dari sektor pajak Galian C.
36. Penggalan potensi pajak terhadap objek pajak baru.

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

1. Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aplikasi SP2D *online*, SIMGAJI.
2. Kualitas kesepahaman tujuan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD.
3. Lahirnya UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Terlambatnya kelengkapan persyaratan batas pencairan oleh OPD.
5. Adanya kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) yang ditentukan dan tidak ditentukan atau *specific grant* dan *block grant*.
6. Masih kurangnya komitmen dan pemahaman perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan BMD, sehingga banyak pekerjaan pengelolaan BMD tertumpu ke bidang Aset BPKD.
7. Masih terdapat beberapa pengguna barang/kuasa pengguna barang yang kurang memahami tentang pentingnya pengelolaan barang daerah dibawah

kekuasaannya secara tertib sesuai aturan yang berlaku, sehingga laporan aset yang disajikan kurang akurat yang berdampak atas keakuratan laporan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan neraca Kabupaten Padang Pariaman.

8. Aplikasi yang belum mengakomodir kebutuhan pengelolaan BMD.
9. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan BMD.
10. Kurangnya kuantitas sdm dilingkungan pejabat penatausahaan barang (tenaga bidang aset BPKD).
11. Kurangnya kualitas SDM pengurus barang pengguna (perangkat daerah).
12. Rasionalisasi anggaran yang mempengaruhi nilai PAGU pada masing-masing kegiatan
13. Keterlambatan dalam pembayaran tunjangan dan honor lainnya yang disebabkan oleh ketersediaan dana dan hal lainnya
14. Kurangnya fasilitas dalam melakukan bimtek sekaitan dengan program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota
15. Masih minimnya sarana dan prasarana dalam pencapaian sasaran
16. Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah tentang kewajiban pembayaran pajak.
17. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam pemungutan dan penyetoran pajak.
18. Sosialisasi perpajakan masih kurang efektif.
19. Pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relative lemah.
20. Belum adanya penyidik pajak daerah.
21. Kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak.
22. Belum dapat diterapkannya *system self assessment system* dalam pemungutan pajak daerah, karena menunggu wajib pajak yang menghitung dan menyetorkan sendiri pajaknya tanpa ditagih itu masih sulit.
23. Masih belum optimalnya pemungutan pajak dilapangan karena keterbatasan SDM, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
24. Adanya piutang pajak yang tidak tertagih karena sudah lewat masa tagih dan alamat wajib pajak tidak ditemukan.
25. Permasalahan perekonomian secara mikro dan makro yang berpengaruh terhadap pendapatan dalam berusaha, sehingga wajib pajak yang sering minta keringanan dari target pajak yang sudah ditetapkan.

26. Masih banyak wajib pajak yang tidak kooperatif dalam memberikan data usahanya.
27. Khusus PBB, banyak objek pajak yang tidak ditemukan.
28. Perubahan Tarif Pajak Sesuai UU No 1 Tahun 2022 Tentang HKPD.
29. Banyak Jenis Retribusi yang hilang sesuai UU No 1 tahun 2022 Tentang HKPD.
30. Adanya upsen pajak mineral bukan logam dan batuan untuk Provinsi.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Daerah. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025:

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Badan dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2025 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
- b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2025, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada

tahun 2025 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.

- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Badan Pengelola Keuangan Daerah mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2025 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.
- d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2025. Jika Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus

Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2025. Ini akan membantu Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2025.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2025. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.1 (T-C 29)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan
Pengelola Keuangan Daerah s/d Tahun 2024**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra a OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5	0	2	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100			
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		A	A	A	100			
						Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100			

							Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%					100%	100%	100
							Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%					100%	100%	100
							Survei Kepuasan Masyarakat	A					A	A	100
5	2	0 1	2.0 1				Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100			
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	3 dokumen					3 dokumen	3 dokumen	100
							Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	100
5	2	0 1	2.0 1	0 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan renstra		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			
							Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	100
5	2	0 1	2.0 1	0 2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100
5	2	0 1	2.0 1	0 3			Jumlah dokumen RKA perubahan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			

						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100
5	2	0 1	2.0 1	0 4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100
5	2	0 1	2.0 1	0 5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100
5	2	0 1	2.0 1	0 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja		30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	100			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 laporan					30 laporan	30 laporan	100
5	0 2	0 1	2.0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terebutnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100			

							Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	100
5	0	0	2.0	0			Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN		1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan					41 orang/bulan	41 orang/bulan	100
5	0	0	2.0	0			Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	100
5	0	0	2.0				Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100			
							Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	39 orang					39 orang	39 orang	100
							Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	39 orang					39 orang	39 orang	100
							Jumlah SKP ASN	39 orang					39 orang	39 orang	100
							Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	39 orang					39 orang	39 orang	100
5	0	0	2.0				Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		80 Orang	80 Orang	80 Orang	100			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 paket					80 paket	80 paket	100

5	0 2	0 1	2.0 5	1 1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan		80 Orang	80 Orang	80 Orang	100			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41 orang					41 orang	41 orang	100
5	0 2	0 1	2.0 6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100			
							Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	3 dokumen					3 dokumen	3 dokumen	100
							Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	3 dokumen					3 dokumen	3 dokumen	100
5	0 2	0 1	2.0 6	0 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		1 tahun	1 tahun	1 tahun	100			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket					1 paket	1 paket	100
5	0 2	0 1	2.0 6	0 3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga		1 tahun	1 tahun	1 tahun	100			
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket					1 paket	1 paket	100
5	0 2	0 1	2.0 6	0 6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		10 eksemplar	10 eksemplar	10 eksemplar	100			

								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen					3 dokumen	3 dokumen	100
5	0 2	0 1	2.0 6	0 8			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		1 tahun	1 tahun	1 tahun	100			
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan					1 laporan	1 laporan	100
5	0 2	0 1	2.0 6	0 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah		1 tahun	1 tahun	1 tahun	100			
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan					1 laporan	1 laporan	100
5	0 2	0 1	2.0 7				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100			
								Jumlah penambahan nilai aset	20 unit						20 unit	20 unit
5	0 2	0 1	2.0 7	1 1			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20 unit	20 unit	20 unit	100			
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit						20 unit	20 unit
5	0 2	0 1	2.0 8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100			

							Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	100
							Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	100
5	02	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat		1 tahun	1 tahun	1 tahun	100			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan					1 laporan	1 laporan	100
5	02	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		1 tahun	1 tahun	1 tahun	100			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
5	02	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100
							Jumlah kendaraan operasional yang disewa		8 kendaraan	8 kendaraan	8 kendaraan	100			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan					12 laporan	12 laporan	100
5	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	100%	100%	100			
							Jumlah objek aset yang terkelola	30 unit					30 unit	30 unit	100

						Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah total nilai aset	30 unit						30 unit	30 unit	100
5	0 2	0 1	2.0 9	0 1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		16 kendaraa n	16 kendaraa n	16 kendaraa n	100				
						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit					10 unit	10 unit		100
5	0 2	0 1	2.0 9	0 9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi		1 tahun	1 tahun	1 tahun	100				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit					1 unit	1 unit		100
5	0 2	0 1	2.0 9	1 0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi		1 tahun	1 tahun	1 tahun	100				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit					20 unit	20 unit		100
5	0 2	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	30-Nov-25	30-Nov-22	30-Nov-23	30-Nov-23	100	30-Nov-24	30-Nov-24		100
							Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%		100
							Persentase kualitas laporan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%		100
5	0 2	0 2	2.0 1				Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran daerah		100%	100%	100%	100				

						Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penyusunan APBD tepat waktu	4 dokume n					4 dokumen	4 dokumen	100
5	0 2	0 2	2.0 1	0 1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun								
5	0 2	0 2	2.0 1	0 2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	100
5	0 2	0 2	2.0 1	0 3		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD		44 Perangkat Daerah	44 OPD	44 OPD	100			
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 dokumen					44 dokumen	44 dokumen	100
5	0 2	0 2	2.0 1	0 4		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD		44 Perangkat Daerah	44 OPD	44 OPD	100			
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 dokumen					44 dokumen	44 dokumen	100
5	0 2	0 2	2.0 1	0 5		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD		44 Perangkat Daerah	44 OPD	44 OPD	100			
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 dokumen					44 dokumen	44 dokumen	100

5	0 2	0 2	2.0 1	0 6			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD		44 Perangkat Daerah	44 OPD	44 OPD	100			
								Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 dokumen					44 dokumen	44 dokumen	100
5	0 2	0 2	2.0 1	0 7			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perbup APBD		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
							dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	100
5	0 2	0 2	2.0 1	0 8			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perbup APBD perubahan		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
								Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	100
5	0 2	0 2	2.0 1	0 9			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100			
								Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	100
5	0 2	0 2	2.0 2				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
								Jumlah dokumen penatausahaan perbendaharaan yang terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	10400 dokumen					10400 dokumen	10400 dokumen	100

5	0 2	0 2	2.0 2	0 1		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi kas daerah		48 kali	48 kali	48 kali	100			
							Jumlah dokumen kerjasama dengan Bank		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100			
							Jumlah koordinasi jumlah aplikasi SP2D online		1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100			
							Jumlah pengajuan BKK prov		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			
							Jumlah laporan BKK prov		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100
5	0 2	0 2	2.0 2	0 3		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD yang diterbitkan dengan anggaran kas belanja		800 dokumen	800 dokumen	800 dokumen	100			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100
5	0 2	0 2	2.0 2	0 4		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah surat perintah pencairan dana yang diterbitkan		8000 dokumen	8000 dokumen	8000 dokumen	100			
							Jumlah daftar penguji SP2D yang diterbitkan		800 dokumen	800 dokumen	800 dokumen	100			
							Jumlah dokumen penelitian SPM yang masuk secara tepat dan benar		8000 dokumen	8000 dokumen	8000 dokumen	100			
							Jumlah SKPP yang diterbitkan sesuai dengan data PNS pensiun dan pindah keluar		300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	100			

						Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100
5	0 2	0 2	2.0 2	0 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan realisasi dana DAK fisik		111 dokumen	111 dokumen	111 dokumen	100			
						Jumlah laporan realisasi dana DAK Non fisik		32 dokumen	32 dokumen	32 dokumen	100			
						Jumlah laporan realisasi DID		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100			
						Jumlah laporan realisasi DBH		24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	100			
						Jumlah laporan DAU		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100	
5	0 2	0 2	2.0 2	0 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang melakukan transaksi non tunai		100 %	100 %	100 %	100			
						Jumlah dokumen perbup tentang transaksi non tunai		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100

5	0 2	0 2	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi pemungutan/pemotongan PFK		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100			
						Jumlah dokumen penyetoran PFK		144 dokumen	144 dokumen	144 dokumen	100			
						Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi PFK		12 kali	12 kali	12 kali	100			
						Jumlah dokumen realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100			
						Jumlah laporan aliran kas		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100			
						Jumlah penerbitan SKPP		300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	100			
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 laporan					1 laporan	1 laporan	100
5	0 2	0 2	2.0 2	0 8	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul	Jumlah pelaksanaan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah		25 kali	25 kali	25 kali	100			

					akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 dokumen						1 dokumen	1 dokumen	100
5	0	0	2.0	0	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100				
	2	2	2	9		Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi tunjangan guru		3 kali	3 kali	3 kali	100				
						Jumlah rekonsiliasi penerimaan dan penyerapan dana DAK non isik dengan instansi terkait		32 kali	32 kali	32 kali	100				
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100	
5	0	0	2.0	1	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100				
	2	2	2	0		Jumlah sosialisasi petunjuk teknis administrasi keuangan		2 kali	2 kali	2 kali	100				
						Jumlah SK penatausahaan keuangan		8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100				

							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100
5	0 2	0 2	2.0 2	1 1			Jumlah tersedianya aplikasi pengelolaan data gaji		1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100			
							Jumlah bendahara gaji yang mampu mengoperasikan aplikasi SIMgaji		91 orang	91 orang	91 orang	100			
							Jumlah tersedianya data gaji yang akurat secara elektronik		6.040 orang	6.040 orang	6.040 orang	100			
							Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis kepada bendahara		44 Perangkat Daerah	44 OPD	44 OPD	100			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	205 orang					205 orang	205 orang	100
5	0 2	0 2	2.0 3				Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah		100%	100%	100%	100			
							Jumlah dokumen pelaporan keuangan tepat waktu	6 dokumen					6 dokumen	6 dokumen	100
5	0 2	0 2	2.0 3	0 2			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	Jumlah laporan rekon	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	100			
								Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	1344 dokumen				1344 dokumen	1344 dokumen	100

							Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi												
5	0 2	0 2	2.0 3	0 7			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah sidang majelis TP-TGR		1 kali	1 kali	1 kali	100							
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 dokumen					5 dokumen	5 dokumen				100	
5	0 2	0 2	2.0 3	0 9			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100							
							Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen				100	
5	0 2	0 2	2.0 3	1 0			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan	Jumlah dokumen sistem prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100							
							Kuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen				100	
5	0 2	0 2	2.0 3	1 1			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Perangkat Daerah yang meningkat kualitas pengelolaan keuangan daerah		44 Perangkat Daerah	44 OPD	44 OPD	100							
							Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	547 orang					547 orang	547 orang				100	
5	0 2	0 2	2.0 4					Persentase penyaluran keuangan daerah		100%	100%	100%	100							

						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah dokumen penyaluran keuangan daerah	5 dokumen					5 dokumen	5 dokumen	100
5	0	0	2.0	0		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		-	-	-	100			
	2	2	4	8			Jumlah Nagari yang disalurkan bantuan keuangan		103 nagari	103 nagari	103 nagari	100			
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 laporan					1 laporan	1 laporan	100
5	0	0	2.0	0		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak		100%	100%	100%	100			
	2	2	4	9			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan					1 laporan	1 laporan	100
5	0	0	2.0	1		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		-	-	-	100			
	2	2	4	0			Jumlah Nagari yang menerima Dana Bagi Hasil		103 nagari	103 nagari	103 nagari	100			
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 laporan					1 laporan	1 laporan	100
5	0	0	2.0			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup keuangan daerah		100%	100%	100%	100			
	2	2	5				Jumlah dokumen dan data pelaporan keuangan tepat waktu	45 dokumen					45 dokumen	45 dokumen	100

5	0 2	0 2	2.0 5	0 2		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang meningkat kualitas pengguna SIPD		44 Perangkat Daerah	44 OPD	44 OPD	100			
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	44 dokumen					44 dokumen	44 dokumen	100
5	0 2	0 3				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat		100%	100%	100%	100			
							Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat		100%	100%	100%	100			
							Persentase BMD yang tertib		70%	75%	75%	100			
							Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	100%					100%	100%	100
							Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat	100%					100%	100%	100
							Persentase BMD yang tertib	100%					100%	100%	100
5	0 2	0 3	2.0 1			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			
							Jumlah laporan barang milik daerah yang tertib dan tepat waktu	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100
5	0 2	0 3	2.0 1	0 1		Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen penyusunan standar harga yang sesuai dengan kondisi pasar		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	100

5	0	0	2.0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Perangkat Daerah yang terorganisir dengan baik		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	100
5	0	0	2.0	0	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase barang yang terinventarisir		70 %	70 %	70 %	100			
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	22 laporan					22 laporan	22 laporan	100
5	0	0	2.0	0	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengamanan aset secara administrasi dan fisik		70 %	70 %	70 %	100			
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan					3 laporan	3 laporan	100
5	0	0	2.0		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 laporan					4 laporan	4 laporan	100
5	0	0	2.0	0	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terkoordinir BMD secara administrasi dan fisik		44 Perangkat Daerah	44 OPD	44 OPD	100			
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	44 laporan					44 laporan	44 laporan	100

5	0 2	0 3	2.0 1	1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terlaksananya penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		44 Perangkat Daerah	44 OPD	44 OPD	100			
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 dokumen					7 dokumen	7 dokumen	100
5	0 2	0 3	2.0 1	1 1		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan rekon penyusunan laporan BMD	44 Perangkat Daerah	44 OPD	44 OPD	100			
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	134 laporan					134 laporan	134 laporan	100
5	0 2	0 3	2.0 1	1 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan BMD yang tersusun dengan baik		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			
						Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	556 laporan					556 laporan	556 laporan	100
5	0 2	0 3	2.0 1	1 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah		44 Perangkat Daerah	44 OPD	44 OPD	100			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 orang					1200 orang	1200 orang	100
5	0 2	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD	95%	95%	95%	95%	100	95%	95%	100
						Persentase Pencapaian Target PAD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

5	0 2	0 4	2.0 1			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
							Persentase Penerimaan PAD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
							Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100
							Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100
5	0 2	0 4	2.0 1			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
5	0 2	0 4	2.0 1	0 2		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah perda dan perbup tentang pajak dan retribusi yang disahkan		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
5	0 2	0 4	2.0 1	0 3		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi cukai tembakau		1 kali	1 kali	1 kali	100			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	33 laporan					33 laporan	33 laporan	100
5	0 2	0 4	2.0 1	0 4			Jumlah aplikasi sistem online pajak daerah (SOPD) yang dibuat		2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	100			

					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 unit					2 unit	2 unit	100
5	0	0	2.0	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data wajib pajak yang diinventarisir dan di update		1 tahun	1 tahun	1 tahun	100			
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 laporan					1 laporan	1 laporan	100
5	0	0	2.0	0	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak PBB yang dinilai dan dimutakhirkan		100 objek pajak	100 objek pajak	100 objek pajak	100			
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10 objek pajak					8 objek pajak	8 objek pajak	100
5	0	0	2.0	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SPPT, DHKP dan SKP yang dicetak		103 Nagari	103 Nagari	103 Nagari	100			
						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 dokumen					3 dokumen	3 dokumen	100
5	0	0	2.0		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Kecamatan yang dilayani		17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	100			
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2620 layanan					2620 layanan	2620 layanan	100
5	0	0	2.0	1	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pajak yang diverifikasi dan dimonitoring valid		1 tahun	1 tahun	1 tahun	100			
						Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100

5	0 2	0 4	2.0 1	1 1			Penagihan Pajak Daerah	Persentase realisasi pemungutan PAD		100 %	100 %	100 %	100			
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	7 dokumen					7 dokumen	7 dokumen	100
5	0 2	0 4	2.0 1				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		100%	100%	100%	100			
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	100
5	0 2	0 4	2.0 1	1 3			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi di kecamatan		17 kecamatan	17 kecamatan	17 kecamatan	100			
								Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	7 dokumen					7 dokumen	7 dokumen	100
5	0 2	0 4	2.0 1				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah		12 OPD	13 OPD	13 OPD	100			
								Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 laporan					1 laporan	1 laporan	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelola keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKD mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang Keuangan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keuangan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Keuangan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Keuangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 rincian Uraian Tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman disebutkan bahwa :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Evaluasi dan Laporan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan
- 3. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
 - a. Subbid Pendataan;
 - b. Subbid Monev & Pelaporan Pendapatan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penetapan.
- 4. Bidang Penagihan
 - a. Subbid Pajak Daerah;
 - b. Subbid Penagihan PBB & BPHTB; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendapatan Lainnya
- 5. Bidang Anggaran terdiri dari :
 - a. Subbid Perencanaan Anggaran;
 - b. Subbid Pengendalian Anggaran; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi SKPKD
- 6. Bidang Aset terdiri dari :
 - a. Subbid Administrasi Aset;
 - b. Subbid Pemanfaatan / Pemberdayaan Aset; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutasi Aset
- 7. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 - a. Subbid Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Subbid Belanja Tidak Langsung; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Belanja Langsung
- 8. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 - a. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
 - b. Subbid Monev dan Pelaporan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Keuangan Daerah

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
- b). Sasaran :
 - 1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2. Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
 - 3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan BPKD
 - 4. Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
- c). Indikator Kinerja :
 - 1. Jumlah Temuan BPK yang Material Terhadap Laporan Keuangan Daerah
 - 2. Jumlah Temuan BPK yang Material Terhadap Pengelolaan BMD
 - 3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat
 - 4. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Tabel 2.2 (T-C 30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Jumlah Temuan BPK yang Material Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material Terhadap Laporan Keuangan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	Opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2022
2.	Jumlah Temuan BPK yang Material Terhadap Pengelolaan BMD	Jumlah Temuan BPK yang Material Terhadap Pengelolaan BMD	0	0	0	0	0	0	0	0	Opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2022
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A	A	Nilai "A" SAKIP BPKD Tahun 2023
4.	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	6	6.5	7	7.5	24.68		7	7.5	Meningkat

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Badan Pengelola Keuangan Daerah Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Temuan	0	0	100	Berhasil
2.	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)		Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	Jumlah Temuan	0	0	100	Berhasil
3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	A	A	100	Berhasil
4.	Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase	6%	24,68	411,3%	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 mencapai target yang sudah ditetapkan bahkan terjadi peningkatan yang signifikan pada indikator 4 (empat) yaitu persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Hal ini disebabkan adanya perubahan dan penyesuaian regulasi terkait pengelolaan pajak dan retribusi. Selain itu juga adanya pelaksanaan penilaian massal dan penilaian individu PBB yang menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak terutama PBB, serta adanya

pelaksanaan pengerjaan jalan tol yang menyebabkan peningkatan pada penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pajak Galian C.

I. Sasaran Strategis 1 (Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah)

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Temuan	0	0	100	Berhasil

Sebagaimana terlihat pada tabel diatas tentang pengukuran capaian sasaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2023 capaian sasaran kinerja sangat berhasil dengan tidak adanya temuan BPK yang material terhadap laporan keuangan daerah yang dibuktikan dengan diperolehnya Opini WTP oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atas LKPD tahun anggaran 2022.

Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dalam urusan penunjang dibidang keuangan telah melakukan berbagai strategi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 45.A/LHP/XVIII.PDG/05/2023 dan Nomor 45.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 yang masing-masing bertanggal 16 Mei 2023 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk kesekian kalinya berhasil kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Sedangkan untuk kinerja Tahun Anggaran 2023 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Pariaman masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

II. Sasaran Strategis 2 (Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD))

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
				Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	Jumlah Temuan	0	0	100	Berhasil

Sasaran 2 (dua) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang bersih dan akuntabel. Pengelolaan aset daerah ini menjadi salah satu sasaran yang diprioritaskan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mencapai sasaran RPJMD tahun 2021-2026, yaitu Birograsi Yang Bersih Dan Akuntabel dengan indikator sasaran yaitu Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab BPKD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah dan pembantu pengurus barang dalam melaksanakan kewenangannya, maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan barang milik daerah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan pengelolaan BMD

Capaian Indikator Kinerja ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Selama tahun 2023 dalam rangka mewujudkan capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan berbagai upaya sebagai berikut :

- 1) Melakukan inventarisasi BMD.
- 2) Melaksanakan rekonsiliasi BMD pertriwulan.
- 3) Melakukan kerjasama dengan perangkat daerah dalam pembayaran pajak kendaraan dinas.
- 4) Melakukan peningkatan konsolidasi internal dan eksternal.

- 5) Melakukan pembinaan terhadap pengurus barang pengguna dan pejabat penatausahaan barang pengguna.
- 6) Maksimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga atas barang / asset daerah yang yang bisa dipinjam pakai.
- 7) Pembayaran pajak kendaraan dinas tepat waktu.
- 8) Penetapan RKBMD tahun 2023 tepat waktu.
- 9) Melakukan pemetaan RKBMD, RPBMD dan standar harga.
- 10) Optimalisasi penghapusan BMD sesuai target yang telah ditetapkan.

III. Sasaran Strategis 3 (Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah)

Tabel 2.6

Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	A	A	100	Berhasil

Dapat diketahui bahwa sasaran 3 (tiga) yaitu meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan pada BPKD ini sangat berkontribusi besar dalam mencapai sasaran lain yang ada di BPKD diantaranya yaitu dalam meningkatkan Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui berbagai upaya dalam pencapaian sasaran ini agar tercapai juga 3 (tiga) sasaran lainnya yang harus dicapai BPKD sehingga capaian sasaran pada tahun 2023 bisa dipertahankan seperti tahun sebelumnya. Upaya-upaya dalam pencapaian sasaran ini diantaranya :

1. Melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan semua pegawai BPKD
2. Komitmen semua pegawai dengan pimpinan dalam pencapaian target
3. Menjalin kerjasama dengan stackholder terkait dalam hal menunjang kelnacaran program dan kegiatan di BPKD
4. Memberikan teguran baik lisan maupun tulisan kepada pegawai dalam hal peningkatan disiplin dan kinerja pegawai BPKD

5. Melakukan berbagai inovasi dalam pencapaian sasaran
6. Memaksimalkan sarana dan prasarana dalam kelancaran pencapaian sasaran dan program yang ada di BPKD
7. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam hal penyediaan cetak karcis

IV. Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 2.7

Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
				Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase	6%	24.68**	411,3%	Sangat Berhasil

Sasaran 4 (empat) Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Kontribusi sektor pajak dan retribusi sangat diharapkan dalam menambah pendapatan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Sebagaimana terlihat pada tabel diatas tentang pengukuran capaian sasaran 4 terdapat peningkatan yang sangat tinggi dari penerimaan pajak dan retribusi daerah di tahun 2023. Dengan beberapa capaian yang diperoleh selama tahun 2023 sebagai berikut :

1. Penyetoran pajak tepat waktu.
2. Penerimaan pajak daerah sampai tahun anggaran tercapai sebesar 91,36% dan penerimaan retribusi daerah tercapai sebesar 92,95%.
3. Penilaian individu terhadap beberapa objek pajak.
4. Pemutakhiran massal pada 3 (tiga) kecamatan, diantara nya Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Enam Lingkung, dan Kecamatan 2X11 Kayu Tanam.
5. Pengoptimalan penerimaan pajak dari sektor pajak Galian C.

6. Penggalan potensi pajak terhadap objek pajak baru.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD), berikut capaian IKD Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 :

Tabel 2.8

**Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Komitmen dengan semua OPD ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan
2.	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu	30-11-23	30-11-24	30-11-25	30-11-26	30-11-23	30-11-24	30-11-25	30-11-26	Perencanaan anggaran sudah terperinci
3.	Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat	100	100	100	100	100	100	100	100	Kepatuhan OPD dalam melengkapi dokumen pencairan sesuai regulasi
4.	Persentase kualitas laporan keuangan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	Rekonsiliasi rutin dalam penyusunan laporan keuangan
5.	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat	100	100	100	100	100	100	100	100	Komitmen dengan seluruh OPD dalam pengelolaan BMD serta Pembinaan terhadap pengelola BMD secara berkala
6.	Persentase BMD yang dimanfaatkan dengan tepat	100	100	100	100	100	100	100	100	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan BMD pada setiap OPD
7.	Persentase Peningkatan PAD	4	4.5	5	5.5	18.47	3.54	5	5.5	Optimalisasi dalam penggunaan aplikasi pajak berbasis elektronik
8.	Persentase Pencapaian Target PAD	100	100	100	100	96.86	90.88	100	100	Pendataan ulang dan penggalan potensi PAD baru
9.	Persentase Tingkat ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat	82.31	82.23	82.17	82.23	84.78	84.07	82.17	82.23	Optimalisasi penyusunan laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah
10	Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Optimalisasi TAPD bersama OPD dalam ketepatan penyusunan APBD
11	Jumlah Perbub tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Optimalisasi TAPD bersama OPD dalam ketepatan penyusunan APBD

12	Rasio belanja modal terhadap APBD	25	28.1	30.2	33.1	13.39	10.43	30.2	33.1	Perencanaan belanja modal sesuai dengan RKBMD
13	Persentase kenaikan pajak dan retribusi daerah	6	6.5	7	7.5	24.68	99.19	7	7.5	Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
14	Rasio PAD terhadap penerimaan APBD	7.19	8.45	9.72	10.01	10.73	10.38	9.72	10.01	Penilaian massal bertahap pada setiap kecamatan
15	Rasio PAD terhadap pengeluaran APBD	7.25	8.64	9.87	10.53	10.73	10.23	9.87	10.53	Kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan PAD

Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang diampu oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Faktor utama keberhasilan capaian IKD ini tentunya komitmen bersama dengan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Dalam pencapaian keberhasilan IKD yang berpengaruh terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Keuangan tentu terdapat berapa hambatan yang ditemui diantaranya :

1. Belum maksimalnya tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK
2. Belum maksimalnya penyusunan perencanaan anggaran sesuai kebutuhan
3. Manajemen Kas Daerah belum optimal dan Kondisi keuangan daerah yang defisit
4. Ketersediaan SDM yang kompeten dan Sarana Prasarana Pengelola keuangan
5. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pengelola BMD
6. Kurangnya pemahaman ASN dalam pemanfaatan BMD
7. Belum disusunnya regulasi terkait reward dan punishment penerimaan pajak
8. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pengelola PAD
9. Keterlambatan dalam pengiriman laporan penggunaan anggaran ke pusat
10. Kualitas Kesepahaman Legislatif dan eksekutif dalam penyusunan APBD
11. Kualitas Kesepahaman Legislatif dan eksekutif dalam penyusunan APBD
12. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah
13. Kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap wajib pajak
14. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak
15. Strategi pemungutan PAD belum maksimal

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dari 4 (empat) indikator secara umum mencapai target 100%, bahkan terdapat capaian yang signifikan pada indikator 4 (empat) yaitu persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Hal ini disebabkan adanya perubahan dan penyesuaian regulasi terkait pengelolaan pajak dan retribusi. Selain itu juga adanya pelaksanaan penilaian massal dan penilaian individu PBB yang menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak terutama PBB, serta adanya pelaksanaan pengerjaan jalan tol yang menyebabkan peningkatan pada penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pajak Galian C
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman antara lain :
 1. Penerapan SPBE dalam pelaksanaan kegiatan yang belum optimal.
 2. Implementasi aplikasi SIPD terkait pengelolaan keuangan daerah yang masih terkendala dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.
 3. Pengelolaan aset daerah yang masih belum efektif secara penatausahaan dan pemanfaatannya.
 4. Kompleksitas permasalahan penetapan potensi pendapatan daerah yang membutuhkan penanganan dini dan komprehensif dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 5. Penyusunan Ranperbup Pajak dan Retribusi Daerah yang belum rampung.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 (T-C 31)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD			NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				208.122.119.334,00			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				208.122.119.334,00
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				208.122.119.334,00		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				208.122.119.334,00
	5.02	KEUANGAN				208.122.119.334,00		5.02	KEUANGAN				208.122.119.334,00
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti,</i>		100%	12.185.545.534,00	1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti,</i>		100%	12.185.545.534,00
			<i>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti,</i>		100%					<i>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti,</i>		100%	
			<i>Survei Kepuasan Masyarakat</i>		A					<i>Survei Kepuasan Masyarakat</i>		A	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah</i>		2 Dokumen	101.512.250,00		5.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah</i>		2 Dokumen	101.512.250,00
			<i>Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu</i>		3 Dokumen					<i>Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu</i>		3 Dokumen	

	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		1 Dokumen	40.018.240,00				<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		1 Dokumen	40.018.240,00
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.02.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>		1 Dokumen	5.000.000,00				<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>		1 Dokumen	5.000.000,00
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD						5.02.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>		1 Dokumen	5.000.000,00				<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>		1 Dokumen	5.000.000,00
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.02.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				
			<i>Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>		1 Dokumen	5.000.000,00				<i>Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>		1 Dokumen	5.000.000,00
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.02.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>		1 Dokumen	5.000.000,00				<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>		1 Dokumen	5.000.000,00

	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		30 Laporan	41.494.010,00				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		30 Laporan	41.494.010,00
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan undangan		2 Dokumen	8.878.583.713,00		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan undangan		2 Dokumen	8.878.583.713,00
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		41 Orang/bulan	8.684.303.713,00				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		41 Orang/bulan	8.684.303.713,00
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	194.280.000,00				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	194.280.000,00
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah SKP ASN Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP		39 Orang	82.675.000,00		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah SKP ASN Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP		39 Orang	82.675.000,00
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		80 Paket	17.750.000,00				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		80 Paket	17.750.000,00

	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						5.02.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		41 Orang	64.925.000,00				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		41 Orang	64.925.000,00
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi		6 Dokumen	618.542.000,00		5.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi		6 Dokumen	618.542.000,00
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.083.000,00				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.083.000,00
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.02.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	32.332.700,00				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	32.332.700,00
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.02.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokumen	5.000.000,00				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokumen	5.000.000,00
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.02.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	9.760.000,00				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	9.760.000,00

	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	562.366.300,00			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	562.366.300,00
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset		20 Unit	16.000.000,00		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	20 Unit	16.000.000,00
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		20 Unit	16.000.000,00				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	16.000.000,00
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan		4 Dokumen	2.358.662.571,00		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	4 Dokumen	2.358.662.571,00
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	800.567.451,00				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	800.567.451,00
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	180.960.000,00				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.960.000,00
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan		12 Laporan	1.377.135.120,00				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	1.377.135.120,00

			Umum Kantor yang Disediakan						Umum Kantor yang Disediakan				
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang terkelola Jumlah total nilai aset		30 Unit	129.570.000,00		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang terkelola Jumlah total nilai aset		30 Unit	129.570.000,00
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		10 Unit	46.890.000,00				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		10 Unit	46.890.000,00
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	39.570.000,00				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	39.570.000,00
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		20 Unit	43.110.000,00				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		20 Unit	43.110.000,00
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu, ,		11/30/2025	191.637.334.000,00	2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu, ,		11/30/2025	191.637.334.000,00
			Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat		100%					Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat		100%	
			Persentase kualitas laporan keuangan daerah		100%					Persentase kualitas laporan keuangan daerah		100%	

	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penyusunan APBD tepat waktu		4 Dokumen	1.475.109.500,00		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penyusunan APBD tepat waktu		4 Dokumen	1.475.109.500,00
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		4 Dokumen	21.050.080,00				Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		4 Dokumen	21.050.080,00
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		4 Dokumen	5.000.000,00				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		4 Dokumen	5.000.000,00
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		44 Dokumen	60.276.920,00				Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		44 Dokumen	60.276.920,00
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		44 Dokumen	5.000.000,00				Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		44 Dokumen	5.000.000,00
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi		44 Dokumen	21.800.000,00				Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi		44 Dokumen	21.800.000,00
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		44 Dokumen	5.000.000,00				Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		44 Dokumen	5.000.000,00
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala						5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				

		Daerah tentang Penjabaran APBD											
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>		4 Dokumen	1.267.272.500,00				<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>		4 Dokumen	1.267.272.500,00
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>		4 Dokumen	5.000.000,00				<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>		4 Dokumen	5.000.000,00
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>		2 Dokumen	84.710.000,00				<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>		2 Dokumen	84.710.000,00
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Jumlah dokumen penatausahaan perbendaharaan yang terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku</i>		10400 Dokumen	374.370.000,00		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Jumlah dokumen penatausahaan perbendaharaan yang terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku</i>		10400 Dokumen	374.370.000,00
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>		1 Dokumen	95.430.000,00				<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>		1 Dokumen	95.430.000,00

	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>		1 Dokumen	14.560.000,00			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>		1 Dokumen	14.560.000,00
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah					5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>		1 Dokumen	3.550.000,00			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>		1 Dokumen	3.550.000,00
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>		1 Dokumen	60.090.000,00			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>		1 Dokumen	60.090.000,00
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>		1 Dokumen	25.000.000,00			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>		1 Dokumen	25.000.000,00

	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				
			<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>		1 Laporan	28.520.000,00			<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>		1 Laporan	28.520.000,00
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i>		1 Dokumen	5.000.000,00			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i>		1 Dokumen	5.000.000,00

										Optimalisasi Kas			
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		1 Dokumen	52.520.000,00				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		1 Dokumen	52.520.000,00
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		1 Dokumen	15.000.000,00				Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		1 Dokumen	15.000.000,00
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		205 Orang	74.700.000,00				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		205 Orang	74.700.000,00

	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Jumlah dokumen pelaporan keuangan tepat waktu</i>		6 Dokumen	346.026.000,00		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Jumlah dokumen pelaporan keuangan tepat waktu</i>		6 Dokumen	346.026.000,00
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>		1344 Dokumen	5.000.000,00				<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>		1344 Dokumen	5.000.000,00
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>		12 Laporan	29.700.000,00				<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>		12 Laporan	29.700.000,00
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>		46 Laporan	75.434.000,00				<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>		46 Laporan	75.434.000,00
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				

			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		4 Dokumen	45.335.000,00				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		4 Dokumen	45.335.000,00
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		5 Dokumen	13.280.000,00				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		5 Dokumen	13.280.000,00
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		2 Dokumen	62.745.000,00				Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		2 Dokumen	62.745.000,00
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		2 Dokumen	5.000.000,00				Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		2 Dokumen	5.000.000,00

	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>		547 Orang	109.532.000,00			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>		547 Orang	109.532.000,00
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>jumlah dokumen penyaluran keuangan daerah</i>		5 Dokumen	189.387.680.500,00		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>jumlah dokumen penyaluran keuangan daerah</i>	5 Dokumen	189.387.680.500,00
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>		1 Laporan	178.187.320.500,00			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>		1 Laporan	178.187.320.500,00
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>		1 Laporan	4.000.000.000,00			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>		1 Laporan	4.000.000.000,00
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>		1 Laporan	7.200.360.000,00			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>		1 Laporan	7.200.360.000,00
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<i>Jumlah dokumen dan data pelaporan keuangan tepat waktu</i>		45 Dokumen	54.148.000,00		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<i>Jumlah dokumen dan data pelaporan keuangan tepat waktu</i>	45 Dokumen	54.148.000,00
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			

			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		44 Dokumen	54.148.000,00				Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		44 Dokumen	54.148.000,00
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat		100%	865.944.800,00	3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang tercatat dengan akurat		100%	865.944.800,00
			Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat		100%					Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat		100%	
			Persentase BMD yang tertib		100%					Persentase BMD yang tertib		100%	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tertib dan tepat waktu		1 Dokumen	865.944.800,00		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tertib dan tepat waktu		1 Dokumen	865.944.800,00
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga				
			Jumlah Standar Harga yang Disusun		2 Dokumen	15.000.000,00				Jumlah Standar Harga yang Disusun		2 Dokumen	15.000.000,00
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2 Dokumen	10.111.200,00				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2 Dokumen	10.111.200,00
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah				
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		22 Laporan	5.000.000,00				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		22 Laporan	5.000.000,00
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah				
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan		3 Laporan	354.440.000,00				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan		3 Laporan	354.440.000,00

			Barang Milik Daerah							Barang Milik Daerah			
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah					5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah					
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		4 Laporan	192.410.000,00			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		4 Laporan	192.410.000,00	
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		44 Laporan	5.000.000,00			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		44 Laporan	5.000.000,00	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		7 Dokumen	69.010.000,00			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		7 Dokumen	69.010.000,00	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		134 Laporan	5.000.000,00			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		134 Laporan	5.000.000,00	
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					

			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		556 Laporan	51.200.000,00				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		556 Laporan	51.200.000,00
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		1200 Orang	158.773.600,00				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		1200 Orang	158.773.600,00
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD		95%	3.433.295.000,00	4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD		95%	3.433.295.000,00
			Persentase Pencapaian Target PAD		100%					Persentase Pencapaian Target PAD		100%	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak, Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah		11 Dokumen Dokumen	3.433.295.000,00		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak, Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah		11 Dokumen Dokumen	3.433.295.000,00
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		1 Dokumen	5.000.000,00				Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		1 Dokumen	5.000.000,00
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		1 Dokumen	176.444.000,00				Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		1 Dokumen	176.444.000,00
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				

			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>		33 Laporan	226.375.000,00				<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>		33 Laporan	226.375.000,00
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						5.02.04.2.0 1.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>		2 Unit	86.936.000,00				<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>		2 Unit	86.936.000,00
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						5.02.04.2.0 1.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>		1 Laporan	158.800.000,00				<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>		1 Laporan	158.800.000,00
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						5.02.04.2.0 1.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				
			<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>		10 Obyek Pajak	2.116.130.000,00				<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>		10 Obyek Pajak	2.116.130.000,00
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						5.02.04.2.0 1.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah				
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>		3 Dokumen	60.240.000,00				<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>		3 Dokumen	60.240.000,00
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						5.02.04.2.0 1.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				
			<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>		2620 Layanan	5.000.000,00				<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>		2620 Layanan	5.000.000,00
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						5.02.04.2.0 1.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				
			<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>		1 Dokumen	26.420.000,00				<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>		1 Dokumen	26.420.000,00

	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						5.02.04.2.0 1.0011	Penagihan Pajak Daerah					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		7 Dokumen	506.340.000,00				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		7 Dokumen	506.340.000,00	
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						5.02.04.2.0 1.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		2 Dokumen	5.000.000,00				Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		2 Dokumen	5.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						5.02.04.2.0 1.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		7 Dokumen	55.610.000,00				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		7 Dokumen	55.610.000,00	
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						5.02.04.2.0 1.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Laporan	5.000.000,00				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Laporan	5.000.000,00	
	J U M L A H					208.122.119.334,00			J U M L A H					208.122.119.334,00

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah. Namun dalam proses ini Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan

yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

Tabel 3.1

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
	(generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas		
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
8	Memperkuat penyelajaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.2

Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
		falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2025 adalah " **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Meningkatnya kemandirian fiskal daerah**" dengan Indikator Tujuan "**Opini BPK atas Laporan Keuangan, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Nilai SAKIP Pemerintah Daerah, Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**".

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja

BPKD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Visi	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target 2026	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2026
Padang Pariaman Maju dan Sejahter	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,70
		Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan APBD	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengendalian Keuangan Daerah	94,225
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	75,909			

					Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	2
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	24,98	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase penerimaan PAD terhadap target	91,182
						Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,51

Tabel 3.4**Indikator Kinerja Daerah (IKD)**

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASLINE	KET
			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,51	

Tabel 3.5**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASLINE	KET
			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	45,34	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	13.241	
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	94.591	
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	1	
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	21,79	
6	Persentase Penurunan SILPA	%	52,84	
7	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-6.904	
8	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	-6.401	
9	Assets Management	%	YA	
10	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	6,94	
11	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	16,866	

12	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	81.403	
----	--	---	--------	--

Tabel 3.6

Program, Sasaran Program, Indikator Program dan Target Tahun 2025

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,00
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100
Program Pegelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	45,34
		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	21,79
		Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	16,866
		Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100
	Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan	Persentase realisasi anggaran Belanja Wajib Pelayanan Dasar	94,591
		Persentase penurunan SILPA	-52,84
		Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	6,94
		Persentase Kepemilikan NPWP	32,54
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100

		Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-6,904
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	81,403
		Opini Laporan Keuangan	WTP
		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	89,707
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	1
		Assets Management	YA
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	13,241
		Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	-6,401
	Meningkatnya kualitas Pengawasan dan Pelaporan Pajak Daerah	Cakupan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	100
	Meningkatnya penerapan sistem Informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	100

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan

misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyesuaian secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

2. Pencapaian SDGs

Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2025 harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4), memastikan akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8). Setiap program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan dinas harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah, termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- **Pemberdayaan ekonomi masyarakat:** Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.
- **Bantuan sosial terarah:** Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.
- **Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat:** Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh

pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di tahun 2025 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2025 dapat disusun secara strategis, efektif, dan berdampak nyata. Ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

- b.** Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7 (TC 33)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				208.122.119.334,00				257.390.614.877,00
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				208.122.119.334,00				257.390.614.877,00
	5.02	KEUANGAN				208.122.119.334,00				257.390.614.877,00
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti</i>	BPKD	100	12.185.545.534,00			100	13.429.067.224,00
			<i>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</i>		100				100	
			<i>Survei Kepuasan Masyarakat</i>		A				A	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu</i>	BPKD	2 Dokumen 3 Dokumen	101.512.250,00			2 Dokumen 3 Dokumen	249.845.793,00
	5.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		BPKD						

			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	BPKD	1 Dokumen	40.018.240,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	47.099.348,00
	5.02.01.2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	BPKD	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	36.465.188,00
	5.02.01.2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	BPKD	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	36.465.188,00
	5.02.01.2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	BPKD	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	36.465.188,00
	5.02.01.2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	BPKD	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	36.465.188,00
	5.02.01.2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		BPKD						

			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	BPKD	30 Laporan	41.494.010,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Laporan	56.885.693,00
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan</i>	BPKD	2 Dokumen	8.878.583.713,00			2 Dokumen	10.462.013.706,00
	5.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		BPKD						
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	BPKD	41 Orang/bulan	8.684.303.713,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		41 Orang/bulan	10.035.176.531,00
	5.02.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	BPKD	12 Dokumen	194.280.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	426.837.175,00
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah SKP ASN Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP</i>	BPKD	39 Orang	82.675.000,00			39 Orang	56.338.715,00
	5.02.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		BPKD						
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	BPKD	80 Paket	17.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80 Paket	36.465.188,00
	5.02.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		BPKD						

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	BPKD	41 Orang	64.925.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		41 Orang	19.873.527,00
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi</i>	BPKD	6 Dokumen	618.542.000,00			6 Dokumen	312.568.891,00
	5.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		BPKD						
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	BPKD	1 Paket	9.083.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	11.039.228,00
	5.02.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		BPKD						
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	BPKD	1 Paket	32.332.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	17.981.227,00
	5.02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	BPKD	3 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	17.017.088,00
	5.02.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	BPKD	1 Laporan	9.760.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA		1 Laporan	17.940.872,00

							ALOKASI UMUM			
	5.02.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	BPKD	1 Laporan	562.366.300,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	248.590.476,00
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah penambahan nilai aset</i>	BPKD	20 Unit	16.000.000,00			20 Unit	24.012.326,00
	5.02.01.2.07.0 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		BPKD						
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	BPKD	20 Unit	16.000.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		20 Unit	24.012.326,00
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan</i>	BPKD	4 Dokumen	2.358.662.571,00			4 Dokumen	2.052.802.382,00
	5.02.01.2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	BPKD	1 Laporan	800.567.451,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	229.543.007,00
	5.02.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	BPKD	12 Laporan	180.960.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	213.685.999,00

	5.02.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	BPKD	12 Laporan	1.377.135.120,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	1.609.573.376,00
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah objek aset yang dikelola Jumlah total nilai aset</i>	BPKD	30 Unit	129.570.000,00			30 Unit	271.485.411,00
	5.02.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		BPKD						
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	BPKD	10 Unit	46.890.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Unit	154.932.073,00
	5.02.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		BPKD						
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	BPKD	1 Unit	39.570.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	68.066.794,00
	5.02.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		BPKD						
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	BPKD	20 Unit	43.110.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Unit	48.486.544,00
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD</i>	BPKD	45.34	191.637.334.000,00			42.57	241.864.236.952,00

			<i>Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik</i>		21.79				22.5	
			<i>Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan</i>		16.866				12.275	
			<i>Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah</i>		100				100	
			<i>Persentase realisasi anggaran Belanja Wajib Pelayanan Dasar</i>		94.591				94.594	
			<i>Persentase penurunan SILPA</i>		-52.84				100	
			<i>Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya</i>		6.94				0	
			<i>Persentase Kepemilikan NPWP</i>		32.54				34.02	
			<i>Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu</i>		100				100	
			<i>Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD</i>		-6.904				-6.903	
			<i>Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)</i>		81.403				59.472	
			<i>Opini Laporan Keuangan</i>		WTP				WTP	
			<i>Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan</i>		89.707				89.710	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Persentase Pengalokasian Penganggaran yang Sesuai Dokumen Perencanaan</i>	BPKD	100	1.475.109.500,00			100	1.659.424.936,00

			<i>Jumlah Dokumen Rancangan Penganggaran</i>		8				8	
			<i>Jumlah Dokumen Verifikasi dan Pembinaan Penganggaran</i>		44				44	
	5.02.02.2.01.001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>	BPKD	4 Dokumen	21.050.080,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	60.775.313,00
	5.02.02.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	BPKD	4 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	60.775.313,00
	5.02.02.2.01.003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		BPKD						
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	BPKD	44 Dokumen	60.276.920,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		44 Dokumen	60.775.313,00
	5.02.02.2.01.004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		BPKD						
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	BPKD	44 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		44 Dokumen	60.775.313,00
	5.02.02.2.01.005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		BPKD						
			<i>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>	BPKD	44 Dokumen	21.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA		44 Dokumen	40.001.095,00

							ALOKASI UMUM			
	5.02.02.2.01.0 006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		BPKD						
			<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>	BPKD	44 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		44 Dokumen	30.093.504,00
	5.02.02.2.01.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		BPKD						
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	BPKD	4 Dokumen	1.267.272.500,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	1.158.123.415,00
	5.02.02.2.01.0 008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		BPKD						
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	BPKD	4 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	121.550.625,00
	5.02.02.2.01.0 009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	BPKD	2 Dokumen	84.710.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	66.555.045,00
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase pengelolaan kas daerah</i>	BPKD	100	374.370.000,00			100	765.768.940,00
			<i>Jumlah Dokumen SP2D yang terbit sesuai SOP</i>		11500				11500	

			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan</i>							
	5.02.02.2.02.001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	BPKD	1 Dokumen	95.430.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	133.705.688,00
	5.02.02.2.02.003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>	BPKD	1 Dokumen	14.560.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	66.852.844,00
	5.02.02.2.02.004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>	BPKD	1 Dokumen	3.550.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	91.162.969,00
	5.02.02.2.02.005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	BPKD	1 Dokumen	60.090.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	97.240.500,00
	5.02.02.2.02.006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi</i>	BPKD	1 Dokumen	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA		1 Dokumen	66.852.844,00

			<i>Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>				ALOKASI UMUM			
	5.02.02.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</i>	BPKD	1 Laporan	28.520.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	48.620.250,00
	5.02.02.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i>	BPKD	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	60.775.313,00
	5.02.02.2.02.009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data</i>	BPKD	1 Dokumen	52.520.000,00	DANA TRANSFER		1 Dokumen	60.775.313,00

			<i>Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>				R UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		BPKD						
			<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>	BPKD	1 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	60.775.313,00
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		BPKD						
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	BPKD	205 Orang	74.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		205 Orang	79.007.906,00
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun</i>	BPKD	2	346.026.000,00			2	760.183.687,00
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi yang Tersusun</i>		3				3	
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pembinaan</i>							
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>	BPKD	1344 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1344 Dokumen	48.620.250,00

	5.02.02.2.03.003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>	BPKD	12 Laporan	29.700.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	48.620.250,00
	5.02.02.2.03.004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	BPKD	46 Laporan	75.434.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		46 Laporan	145.860.750,00
	5.02.02.2.03.005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		BPKD						
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	BPKD	4 Dokumen	45.335.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	182.325.938,00
	5.02.02.2.03.007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>	BPKD	5 Dokumen	13.280.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Dokumen	24.310.125,00

	5.02.02.2.03.009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>	BPKD	2 Dokumen	62.745.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	79.007.906,00
	5.02.02.2.03.010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	BPKD	2 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	49.112.530,00
	5.02.02.2.03.011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		BPKD						
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	BPKD	547 Orang	109.532.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		547 Orang	182.325.938,00
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase realisasi pengelolaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah</i>	BPKD	100	189.387.680.500,00			100	238.498.114.825,00
	5.02.02.2.04.008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	BPKD	1 Laporan	178.187.320.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	218.822.134.752,00
	5.02.02.2.04.009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		BPKD						

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	BPKD	1 Laporan	4.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	12.215.809.856,00
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		BPKD					
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>	BPKD	1 Laporan	7.200.360.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	7.460.170.217,00
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<i>Persentase pengelolaan data dan imlementasi SIPD lingkup pengelolaan keuangan daerah</i>	BPKD	100	54.148.000,00		100	180.744.564,00
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		BPKD					
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</i>	BPKD	44 Dokumen	54.148.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	44 Dokumen	180.744.564,00
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase penambahan nilai aset tetap</i>	BPKD	1	865.944.800,00		1	699.663.266,00
			<i>Assets Management</i>		YA			YA	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase BMD yang terinventarisasi dan dilaporkan</i>	BPKD	100	865.944.800,00		100	699.663.266,00
			<i>Persentase kebijakan dan standarisasi pengadaan BMD yang tersusun</i>		100			100	
			<i>Persentase BMD yang dioptimalkan penggunaan, pemanfaatn, pemimdahtanganan, pemusnahan dan penghapusan nya</i>		100			100	

			<i>Persentase BMD yang dioptimalkan pengamanannya</i>		100				100	
			<i>Persentase pengguna BMD yang ditingkatkan kapasitasnya</i>		100				100	
	5.02.03.2.01.001	Penyusunan Standar Harga		BPKD						
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	BPKD	2 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	182.325.938,00
	5.02.03.2.01.003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	BPKD	2 Dokumen	10.111.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	12.522.145,00
	5.02.03.2.01.006	Inventarisasi Barang Milik Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>	BPKD	22 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		22 Laporan	44.730.630,00
	5.02.03.2.01.007	Pengamanan Barang Milik Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	BPKD	3 Laporan	354.440.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Laporan	24.310.125,00
	5.02.03.2.01.008	Penilaian Barang Milik Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil</i>	BPKD	4 Laporan	192.410.000,00	DANA TRANSFER UMUM-		4 Laporan	60.775.313,00

			<i>Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>				DANA ALOKASI UMUM			
	5.02.03.2.01.009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	BPKD	44 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		44 Laporan	66.372.354,00
	5.02.03.2.01.010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	BPKD	7 Dokumen	69.010.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Dokumen	105.892.473,00
	5.02.03.2.01.011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	BPKD	134 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		134 Laporan	23.477.503,00
	5.02.03.2.01.012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>	BPKD	556 Laporan	51.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		556 Laporan	66.658.971,00
	5.02.03.2.01.013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		BPKD						

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	BPKD	1200 Orang	158.773.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1200 Orang	112.597.814,00
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<i>Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah</i>	BPKD	13.241	3.433.295.000,00			13.241	1.397.647.435,00
			<i>Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD</i>		-6.401				-6.401	
			<i>Cakupan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan</i>		100				100	
			<i>Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital</i>		100				100	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah</i>	BPKD	100	3.433.295.000,00			100	1.397.647.435,00
			<i>Persentase Realisasi Pajak Daerah non PBB dan BPHTB</i>		100				100	
			<i>Persentase Realisasi PBB dan BPHTB</i>		100				100	
			<i>Persentase wajib pajak baru yang terdaftar</i>		100				100	
			<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah</i>		A (88,50)				A (88,60)	
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan Pajak Daerah</i>		4				4	
	5.02.04.2.01.001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	BPKD	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA		1 Dokumen	60.775.313,00

							ALOKASI UMUM			
	5.02.04.2.01.0 002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</i>	BPKD	1 Dokumen	176.444.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	13.507.921,00
	5.02.04.2.01.0 003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	BPKD	33 Laporan	226.375.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		33 Laporan	60.586.909,00
	5.02.04.2.01.0 004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	BPKD	2 Unit	86.936.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	60.775.313,00
	5.02.04.2.01.0 005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>	BPKD	1 Laporan	158.800.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	234.835.808,00
	5.02.04.2.01.0 007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		BPKD						
			<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>	BPKD	10 Obyek Pajak	2.116.130.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		10 Obyek Pajak	140.433.515,00

	5.02.04.2.01.0 008	Penetapan Wajib Pajak Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>	BPKD	3 Dokumen	60.240.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	85.085.438,00
	5.02.04.2.01.0 009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	BPKD	2620 Layanan	5.000.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		2620 Layanan	60.775.313,00
	5.02.04.2.01.0 010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>	BPKD	1 Dokumen	26.420.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	72.930.375,00
	5.02.04.2.01.0 011	Penagihan Pajak Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>	BPKD	7 Dokumen	506.340.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		7 Dokumen	463.843.263,00
	5.02.04.2.01.0 012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>	BPKD	2 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	60.775.313,00
	5.02.04.2.01.0 013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		BPKD						

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	BPKD	7 Dokumen	55.610.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Dokumen	22.547.641,00
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		BPKD						
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	BPKD	1 Laporan	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	60.775.313,00
	J U M L A H					208.122.119.334,00				257.390.614.877,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1

MATRIKS RENJA FORMAT SIPD

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERIO DE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKIR AAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Be rkurang (10- 12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH								208.122.119 .334,00	231.408.896 .799,20	219.684.955.126, 00	11.562.835.79 2,00						257.390.614 .877,00	
	5	UNSUR PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN							208.122.119 .334,00	231.408.896 .799,20	219.684.955.126, 00	11.562.835.79 2,00							257.390.614 .877,00	
	5.02	KEUANGAN							208.122.119 .334,00	231.408.896 .799,20	219.684.955.126, 00	11.562.835.79 2,00							257.390.614 .877,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti				100	100	12.185.545. 534,00	20.749.727. 146,20	18.827.718.773,0 0	1.243.521.690, 00							13.429.067. 224,00	
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti				100	100												
			Survei Kepuasan Masyarakat				A	A												
	5.02.01.2.0 1	Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah laporan				2 Dokum en 3	2 Dokum en 3	101.512.250 ,00	147.264.010 ,00	140.877.208,00	39.364.958,00			-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an	-		249.845.793 ,00	BADAN PENGE LA KEUANG

		Perangkat Daerah	capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah				Dokumen	Dokumen								Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				AN DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	40.018.240,00	65.770.000,00	66.287.400,00	26.269.160,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			47.099.348,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			36.465.188,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

																Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	5.02.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			36.465.188,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			36.465.188,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			36.465.188,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				30 Laporan	30 Laporan	41.494.010,00	81.494.010,00	74.589.808,00	33.095.798,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			56.885.693,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	8.878.583,713,00	14.625.086.718,20	14.521.759.518,00	5.643.175.805,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas	-		10.462.013.706,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

																Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el					
	5.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/ b ulan	41 Orang/ b ulan	8.684.303.7 13,00	14.290.766. 718,20	14.286.419.518,0 0	5.602.115.805, 00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el			10.035.176. 531,00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH	
	5.02.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokum en	12 Dokum en	194.280.000 ,00	334.320.000 ,00	235.340.000,00	41.060.000,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el			426.837.175 ,00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH	
	5.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat				39 Orang	39 Orang	82.675.000, 00	407.170.000 ,00	89.296.500,00	6.621.500,00			-	5. Peningk atan	-		56.338.715, 00	BADAN PENGEL OLA	

		Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah SKP ASN Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP												Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	80 Paket	17.750.000,00	37.000.000,00	0,00	-17.750.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			36.465.188,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				41 Orang	41 Orang	64.925.000,00	370.170.000,00	89.296.500,00	24.371.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan			19.873.527,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

																Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi				6 Dokumen	6 Dokumen	618.542.000,00	691.802.300,00	327.224.580,00	- 291.317.420,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		312.568.891,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.083.000,00	12.083.000,00	12.083.000,00	3.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			11.039.228,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.332.700,00	32.332.700,00	32.332.700,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			17.981.227,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			17.017.088,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	9.760.000,00	14.750.000,00	14.750.000,00	4.990.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			17.940.872,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

																5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	562.366.300,00	632.636.600,00	268.058.880,00	- 294.307.420,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			248.590.476,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset				20 Unit	20 Unit	16.000.000,00	630.810.000,00	265.210.000,00	249.210.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		24.012.326,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

	5.02.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	16.000.000,00	630.810.000,00	265.210.000,00	249.210.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			24.012.326,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	2.358.662.571,00	4.017.714.118,00	3.369.620.967,00	1.010.958.396,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		2.052.802.382,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	800.567.451,00	1.123.858.998,00	1.123.858.998,00	323.291.547,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			229.543.007,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

															5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel					
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.960.000,00	280.800.000,00	211.200.000,00	30.240.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			213.685.999,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.377.135.120,00	2.613.055.120,00	2.034.561.969,00	657.426.849,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			1.609.573.376,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

																akuntabel				
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola Jumlah total nilai aset				30 Unit	30 Unit	129.570.000,00	229.880.000,00	113.730.000,00	-15.840.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		271.485.411,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	46.890.000,00	80.990.000,00	46.890.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			154.932.073,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	39.570.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	-14.570.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			68.066.794,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

													Kel/De sa				ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el				
	5.02.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi</i>				20 Unit	20 Unit	43.110.000, 00	73.890.000, 00	41.840.000,00	-1.270.000,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el				48.486.544, 00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD</i>				45.34	45.34	191.637.334 .000,00	205.930.723 .853,00	198.905.177.013, 00	50.226.902.95 2,00								241.864.236 .952,00	
			<i>Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik</i>				21.79	21.79													
			<i>Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan</i>				16.866	16.866													
			<i>Persentase Akses publik terhadap informasi</i>				100	100													

			keuangan daerah																
			Persentase realisasi anggaran Belanja Wajib Pelayanan Dasar				94.591	94.591											
			Persentase penurunan SILPA				-52.84	-52.84											
			Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya				6.94	6.94											
			Persentase Kepemilikan NPWP				32.54	32.54											
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu				100	100											
			Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD				-6.904	-6.904											
			Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)				81.403	81.403											
			Opini Laporan Keuangan				WTP	WTP											
			Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan				89.707	89.707											
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Pengalokasian Penganggaran yang Sesuai Dokumen Perencanaan						1.475.109.500,00	2.009.509.700,00	1.689.051.260,00	213.941.760,00		-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Birokrasi yang bersih dan akuntabel		1.659.424.936,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
							100	100											

																5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
			Jumlah Dokumen Rancangan Penganggaran				8	8												
			Jumlah Dokumen Verifikasi dan Pembinaan Penganggaran				44	44												
	5.02.02.2.0 1.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	21.050.080,00	41.236.000,00	17.342.000,00	-3.708.080,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			60.775.313,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan			60.775.313,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

																an Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el					
	5.02.02.2.0 1.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																			
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				44 Dokum en	44 Dokum en	60.276.920,00	70.277.500,00	30.458.000,00	-29.818.920,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			60.775.313,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.0 1.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				44 Dokum en	44 Dokum en	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			60.775.313,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	

	5.02.02.2.0 1.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	44 Dokumen	21.800.000,00	19.060.000,00	7.985.000,00	-13.815.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			40.001.095,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				44 Dokumen	44 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			30.093.504,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 1.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.267.272,50,00	1.791.486,20,00	1.596.071.260,00	328.798.760,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transpa			1.158.123,45,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

													Kel/De sa			ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el					
	5.02.02.2.0 1.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokum en	4 Dokum en	5.000.000,0 0	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el			121.550.625 ,00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH	
	5.02.02.2.0 1.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokum en	2 Dokum en	84.710.000, 00	87.450.000, 00	37.195.000,00	-47.515.000,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa			66.555.045, 00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH	

																ran dan akuntabel				
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pengelolaan kas daerah				100	100	374.370.000,00	450.980.000,00	176.728.450,00	- 197.641.550,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		765.768.940,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen SP2D yang terbit sesuai SOP				11500	11500												
			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan																	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	95.430.000,00	0,00	0,00	-95.430.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

	5.02.02.2.0 2.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				-	1 Dokum en	0,00	182.460.000 ,00	79.863.300,00	79.863.300,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el		133.705.688 ,00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokum en	1 Dokum en	14.560.000, 00	0,00	0,00	-14.560.000,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el		0,00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				-	1 Dokum en	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa		66.852.844, 00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH

													Kel/De sa			ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el				
	5.02.02.2.0 2.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokum en	1 Dokum en	3.550.000,0 0	0,00	0,00	-3.550.000,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el			0,00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				-	1 Dokum en	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa			91.162.969, 00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH

																ran dan akuntab el				
	5.02.02.2.0 2.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokum en	1 Dokum en	60.090.000, 00	0,00	0,00	-60.090.000,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el			0,00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				-	1 Dokum en	0,00	120.000.000 ,00	42.346.650,00	42.346.650,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el			97.240.500, 00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan				1 Dokum en	1 Dokum en	25.000.000, 00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam	DANA TRANSF ER UMUM- DANA	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an			0,00	BADAN PENGEL OLA KEUANG

			Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank										atan, Semua Kel/De sa	ALOKASI UMUM		Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				AN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			66.852.844,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan				1 Laporan	1 Laporan	28.520.000,00	0,00	0,00	-28.520.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

			Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)													Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el				
	5.02.02.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				-	1 Lapora n	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el			48.620.250, 00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokum en	1 Dokum en	5.000.000,0 0	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik			0,00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH

																yang bersih, transparan dan akuntabel				
	5.02.02.2.0 2.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			60.775.313,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	52.520.000,00	0,00	0,00	-52.520.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		

			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			60.775.313,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 2.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			60.775.313,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

			aban Sub Kegiatan												5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel					
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				205 Orang	205 Orang	74.700.000,00	0,00	0,00	-74.700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				-	205 Orang	0,00	148.520.000,00	54.518.500,00	54.518.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			79.007.906,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

																akuntabel				
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun				2	2	346.026.000,00	354.306.000,00	163.316.850,00	-182.709.150,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		760.183.687,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi yang Tersusun				3	3												
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pembinaan																	
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1344 Dokumen	1344 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			48.620.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

	5.02.02.2.0 3.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	29.700.000, 00	34.700.000, 00	19.013.100,00	-10.686.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			48.620.250, 00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 3.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				46 Laporan	46 Laporan	75.434.000, 00	78.664.000, 00	39.234.200,00	-36.199.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			145.860.750 ,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 3.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan				4 Dokumen	4 Dokumen	45.335.000, 00	45.335.000, 00	17.039.450,00	-28.295.550,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transpa			182.325.938 ,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

			Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota										Kel/Desa			ran dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	13.280.000,00	13.280.000,00	6.448.000,00	-6.832.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			24.310.125,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	62.745.000,00	62.745.000,00	27.618.000,00	-35.127.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			79.007.906,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

																ran dan akuntab el				
	5.02.02.2.0 3.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			<i>Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				2 Dokum en	2 Dokum en	5.000.000,0 0	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el			49.112.530, 00	BADAN PENGE LA KEUANG AN DAERAH
	5.02.02.2.0 3.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjaw aban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				547 Orang	547 Orang	109.532.000 ,00	119.582.000 ,00	53.964.100,00	-55.567.900,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el			182.325.938 ,00	BADAN PENGE LA KEUANG AN DAERAH
	5.02.02.2.0 4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase realisasi pengelolaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan</i>				100%	100%	189.387.680 .500,00	202.992.204 .153,00	196.832.550.253, 00	7.444.869.753, 00			-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang	-		238.498.114 .825,00	BADAN PENGE LA KEUANG AN DAERAH

			keuangan daerah													bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	5.02.02.2.0 4.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	178.187.320.500,00	183.503.577.100,00	177.943.923.200,00	- 243.397.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			218.822.134.752,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.0 4.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000.000,00	10.000.000.000,00	9.400.000.000,00	5.400.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			12.215.809.856,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

																bersih, transpa ran dan akuntab el				
	5.02.02.2.0 4.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>				1 Lapora n	1 Lapora n	7.200.360.000,00	9.488.627.053,00	9.488.627.053,00	2.288.267.053,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			7.460.170.217,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<i>Persentase pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup pengelolaan keuangan daerah</i>				100%	100%	54.148.000,00	123.724.000,00	43.530.200,00	-10.617.800,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		180.744.564,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah</i>				44 Dokum en	44 Dokum en	54.148.000,00	123.724.000,00	43.530.200,00	-10.617.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			180.744.564,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

			Daerah Bidang Keuangan Daerah										Semua Kel/De sa			yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el				
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOL AAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penambahan nilai aset tetap				1	1	865.944.800 ,00	960.944.800 ,00	1.013.309.540,00	- 166.281.534,0 0							699.663.266 ,00	
			Assets Management				YA	YA												
	5.02.03.2.0 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang terinventarisasi dan terlaporkan				100	100	865.944.800 ,00	960.944.800 ,00	1.013.309.540,00	147.364.740,0 0			-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el	-		699.663.266 ,00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH
			Persentase kebijakan dan standarisasi pengadaan BMD yang tersusun				100	100												
			Persentase BMD yang dioptimalkan penggunaan, pemanfaatan, pemimdahtangan, pemusnahan dan				100	100												

			penghapusan nya																	
			Persentase BMD yang dioptimalkan pengamanannya				100	100												
			Persentase pengguna BMD yang ditingkatkan kapasitasnya				100	100												
	5.02.03.2.0 1.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokum en	2 Dokum en	15.000.000, 00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el			0,00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				-	2 Dokum en	0,00	17.235.000, 00	7.051.500,00	7.051.500,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan			182.325.938 ,00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH

																akuntabel				
	5.02.03.2.0 1.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.111.200,00	0,00	0,00	-10.111.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				-	2 Dokumen	0,00	10.525.000,00	4.703.000,00	4.703.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			12.522.145,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				22 Laporan	22 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN

													Semua Kel/De sa	ALOKASI UMUM		yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel					AN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				-	22 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			44.730.630,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5.02.03.2.0 1.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	354.440.000,00	0,00	0,00	- 354.440.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	

																yang bersih, transparan dan akuntabel				
	5.02.03.2.0 1.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				-	3 Laporan	0,00	356.887.500,00	662.914.500,00	662.914.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			24.310.125,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	192.410.000,00	0,00	0,00	- 192.410.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		

			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				-	4 Laporan	0,00	85.060.000,00	81.996.000,00	81.996.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			60.775.313,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				44 Laporan	44 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				-	44 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			66.372.354,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

																5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	5.02.03.2.0 1.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	69.010.000,00	0,00	0,00	-69.010.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				-	7 Dokumen	0,00	70.085.000,00	32.274.000,00	32.274.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			105.892.473,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

																akuntabel				
	5.02.03.2.0 1.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				134 Laporan	134 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				-	134 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			23.477.503,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				556 Laporan	556 Laporan	51.200.000,00	0,00	0,00	-51.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN

													Semua Kel/De sa	ALOKASI UMUM		yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel					AN DAERAH
	5.02.03.2.0 1.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				-	556 Laporan	0,00	74.873.000,00	28.462.300,00	28.462.300,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			66.658.971,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
	5.02.03.2.0 1.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1200 Orang	1200 Orang	158.773.600,00	0,00	0,00	- 158.773.600,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	

																yang bersih, transparan dan akuntabel				
	5.02.03.2.0 1.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				-	1200 Orang	0,00	346.279.300,00	195.908.240,00	195.908.240,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			112.597.814,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<i>Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah</i>				13.241	13.241	3.433.295.000,00	3.767.501.000,00	938.749.800,00	- 2.035.647.565,00							1.397.647.435,00	
			<i>Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD</i>				-6.401	-6.401												
			<i>Cakupan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan</i>				100	100												
			<i>Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital</i>				100	100												
	5.02.04.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah</i>				100	100	3.433.295.000,00	3.767.501.000,00	938.749.800,00	- 2.494.545.200,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang	-		1.397.647.435,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

																bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el				
			Persentase Realisasi Pajak Daerah non PBB dan BPHTB				100	100												
			Persentase Realisasi PBB dan BPHTB				100	100												
			Persentase wajib pajak baru yang terdaftar				100	100												
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah				A (88,50)	A (88,50)												
			Jumlah Dokumen Pelaporan Pajak Daerah				4	4												
	5.02.04.2.0 1.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokum en	1 Dokum en	5.000.000,0 0	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan			60.775.313, 00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH

																akuntabel				
	5.02.04.2.0 1.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	176.444.000,00	176.444.000,00	73.873.600,00	- 102.570.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			13.507.921,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				33 Laporan	33 Laporan	226.375.000,00	243.745.000,00	47.336.100,00	- 179.038.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			60.586.909,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	86.936.000,00	206.936.000,00	144.585.000,00	57.649.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			60.775.313,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

													Semua Kel/De sa	BALIK NAMA KENDAR AAN BERMOT OR (BBNKB)		yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el					AN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Lapora n	1 Lapora n	158.800.000 ,00	325.376.000 ,00	230.535.100,00	71.735.100,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDAR AAN BERMOT OR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDAR AAN BERMOT OR (BBNKB)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el			234.835.808 ,00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH	
	5.02.04.2.0 1.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																			
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				10 Obyek Pajak	10 Obyek Pajak	2.116.130.0 00,00	2.116.130.0 00,00	111.060.000,00	- 2.005.070.000, 00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik yang bersih, transpa ran dan akuntab el 5. Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik			140.433.515 ,00	BADAN PENGEL OLA KEUANG AN DAERAH	

																yang bersih, transparan dan akuntabel				
	5.02.04.2.0 1.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	60.240.000,00	60.240.000,00	22.812.000,00	-37.428.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			85.085.438,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>				2620 Layanan	2620 Layanan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			60.775.313,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		

			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokum en	1 Dokum en	26.420.000,00	26.420.000,00	10.423.000,00	-15.997.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			72.930.375,00	BADAN PENGEL OLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				7 Dokum en	7 Dokum en	506.340.000,00	506.340.000,00	203.853.000,00	- 302.487.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			463.843.263,00	BADAN PENGEL OLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				2 Dokum en	2 Dokum en	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			60.775.313,00	BADAN PENGEL OLA KEUANGAN DAERAH

															5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel					
	5.02.04.2.0 1.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	55.610.000,00	105.870.000,00	84.272.000,00	28.662.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			22.547.641,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.0 1.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			60.775.313,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

																akuntabel				
	5.02.04.2.0 1.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				-	1 Laporan	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	J U M L A H								208.122.119 .334,00	231.408.896 .799,20	219.684.955.126, 00	- 23.466.557.11 5,86							257.390.614 .877,00	

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan BPKD Tahun 2025 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Dinas perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Dinas harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Dinas dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Dinas ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah

dilaksanakan. Dinas diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Dinas menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Dinas yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah, 28 Juli 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



TASLIM LETER, SE, Ak
NIP. 19740715 200212 1 011

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	✓
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(WAHYUNI, SE, FRMP)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	